KEUANGAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN DAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM

Oleh: Citranu

ABSTRAK

Hukum sangat berhubungan erat dengan ekonomi, disatu sisi hukum bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi, begitu juga sebaliknya ekonomi dapat digunakan sebagai pertimbangan prioritas dari hukum itu sendiri. Pendekatan ekonomi lebih menitikberatkan kepada manfaat ekonomi yang didapat dari suatu ketentuan hukum, berikut analisis ekonomi terhadap hukum pada kasus adanya pertentangan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan Keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap kerugian keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang keuangan negara: keuangan negara yang dipisahkan atau yang dimasukkan ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas tetap termasuk sebagai keuangan negara sedangkan menurut Undang-Undang BUMN dan Perseroan Terbatas: keuangan negara yang dipisahkan dan disertakan didalam BUMN dan Perseroan Terbatas secara otomatis menjadi harta kekayaan yang terpisahkan dari kekayaan negara sehingga kekayaan negara tersebut bersifat mandiri dan tunduk kepada aturan hukum BUMN dan Perseroan Terbatas. Dari kedua sudut pandang ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula apabila terjadi kerugian, yang bisa menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidananya pelaku apabila didalam menjalankan kebijakan pada BUMN atau Perseroan terbatas terdapat kerugian, dan kerugian tersebut bisa dikatakan murni kerugian BUMN atau Perseroan Terbatas ataukah kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Analisis Ekonomi Terhadap Hukum, Pemisahan Keuangan Negara, korupsi.

*Dosen pada Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya

I. PENDAHULUAN

Perkembangan permasalahan hukum yang bersifat dinamis dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menciptakan aturan hukum yang bersifat responsive dan efektif dalam memecahkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum terkadang tercipta dikarenakan adanya konflik antara norma hukum itu sendiri, sebagai contoh adalah pertentangan antara keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Persero atau BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam aturan hukum BUMN dan Persero atau Perseroan Terbatas dengan aturan hukum keuangan negara, berikut pengertian BUMN dan Persero berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yakni: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sebagaimana diketahui dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: keuangan negara yang dipisahkan dan disertakan didalam BUMN dan Perseroan Terbatas secara otomatis menjadi harta kekayaan yang terpisahkan dari kekayaan negara sehingga kekayaan negara tersebut bersifat mandiri dan tunduk kepada aturan hukum BUMN dan Perseroan Terbatas. Pengertian Kekayaan negara yang dipisahkan menurut Pasal 1 angka 10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. akan tetapi dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara: tetap bersikukuh bahwa keuangan negara yang dipisahkan atau yang dimasukkan ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas tetap termasuk sebagai keuangan negara, apalagi dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014.

Konsekuensi hukum terhadap keuangan negara yang telah dipisahkan tersebut tetap merupakan harta kekayaan negara maka apabila terjadi permasalahan kerugian keuangan negara didalam pengambilan keputusan usaha yang dilakukan oleh direksi BUMN dan Perseroan Terbatas maka kerugian tersebut bukan merupakan semata-mata kerugian BUMN dan Perseroan Terbatas melainkan menjadi kerugian keuangan negara, sehingga dengan adanya kerugian keuangan negara maka permasalahan ini melahirkan suatu perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara sebagaimana pengertian tindak pidana korupsi, sebagaimana perkara Dahlan Iskan atas dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha yang merupakan BUMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Dahlan Iskan dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara, akan tetapi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya Dahlan Iskan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dan sampai pada tulisan ini dibuat kasus ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Beranjak dari pada realitas kasus tersebut, maka penulis mencoba mengkaji dari sudut pandang yang berbeda terhadap keuangan negara yang dipisahkan dan akibat hukum kerugian keuangan negara dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mencoba menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum, terkait keuangan negara yang dipisahkan dan kerugian keuangan negara yang berada pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang sebagian modalnya berasal dari keuangan negara, maka tulisan hukum ini penulis beri judul "Keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum".

II. PEMBAHASAN

A. Keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum.

Keuangan negara dari sudut pandang pendekatan ekonomi terhadap hukum yang terdiri dari pendekatan rasionalitas, konsep nilai, konsep efisiensi dan konsep utility:

- a) **Pendekatan rasionalitas** menurut Posner yakni rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih dari apa yang mereka inginkan dan harapkan (Richard Posner dalam Fajar Sugianto. 2003, hlm 33) dihubungkan dengan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum. Direksi BUMN dan Perseroan Terbatas memiliki pilihan untuk mematuhi peraturan mana yang bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan nilai ekonomis, Direksi bisa saja tunduk kepada undang-undang keuangan negara yang menyatakan keuangan negara yang dipisahkan termasuk ke dalam keuangan negara sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,..... , **g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah**, h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, **i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.** Akan tetapi dengan Direksi BUMN dan Perseroan Terbatas mematuhi aturan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Direksi BUMN dan Perseroan akan mendapatkan kemudahan didalam pengambilan keputusan secara ekonomi, atau justru Direksi BUMN dan Perseroan Terbatas merasa kebebasan pengambilan keputusan usahanya terkungkung karena penyertaan modal yang ada di BUMN dan Perseroan Terbatas merupakan keuangan negara dan apabila terjadi kesalahan dan merugikan keuangan BUMN dan Perseroan Terbatas dalam pengambilan keputusan usaha maka termasuk kedalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sehingga dengan rasionalitas yang dimiliki oleh setiap individu Direksi BUMN dan Perseroan Terbatas membuat suatu pilihan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Pilihan yang bisa diambil oleh Direksi BUMN dan Perseroan Terbatas adalah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4 (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b. kapitalisasi cadangan, c. sumber lainnya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 3 (1) Pemegang

saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Artinya disini telah terjadi pemisahan harta kekayaan dari negara dengan disertakannya modal ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas sehingga keuangan negara yang dimaksud tidak bisa dikatakan sebagai keuangan negara murni, karena sudah tercampur menjadi satu dengan modal yang bukan berasal dari keuangan negara, apabila ada terjadi kerugian didalam pengelolaan BUMN dan Perseroan Terbatas tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana aturan hukum keuangan negara dan aturan hukum tindak pidana korupsi.

- b) Pendekatan rasionalitas lebih memilih untuk menjadikan keuangan negara yang dipisahkan dan masuk kedalam penyertaan modal didalam BUMN dan Perseroan Terbatas tidak sebagai keuangan negara yang murni karena sudah menjadi satu kesatuan dengan modal yang bersumber bukan berasal dari keuangan negara, sehingga menghindari resiko masuk kedalam tindak pidana korupsi yang pastinya merugikan keuangan negara. Pendekatan rasionalitas merupakan pendekatan pilihan yang mana dianggap sebagai pilihan yang aman dan menguntungkan.
- c) **Pendekatan Nilai** terhadap keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas: sebagaimana nilai diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non moneter, sehingga yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*self interest*) manusia untuk mencapai kepuasan. (Richard Posner dalam Fajar Sugianto. 2003, hlm. 34)

Aturan hukum keuangan negara yang dipisahkan didalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dianggap masih sebagai keuangan negara, maka dapat menghambat langkah BUMN dan Perseroan Terbatas untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai kesejahteraan.

Menghambat memperoleh keuntungan disini dikarenakan ketakutan dari Direksi BUMN dan Perseroan Terbatas untuk mengambil langkah bisnis atau kebijakan usaha didalam pengelolaan apabila sampai terjadi kekeliruan akan merugikan keuangan negara dan berujung tindak pidana korupsi.

Pendekatan nilai terhadap keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas dapat diartikan murni sebagai keuangan BUMN dan Perseroan Terbatas dan bukan keuangan negara lagi karena sudah dipisahkan sehingga Direksi didalam pengelolaan BUMN dan Perseroan terbatas bisa bergerak bebas untuk mendapatkan nilai kepuasan dalam pengelolaan BUMN dan Perseroan Terbatas tanpa harus dihantui resiko tindak pidana korupsi. Pendekatan nilai juga menitikberatkan ketidakpuasan terhadap aturan hukum keuangan negara yang dipisahkan apabila masih dianggap sebagai keuangan negara murni karena masih ada celah penghukuman melalui tindak pidana korupsi apabila merugikan keuangan negara.

- d) **Pendekatan Efisiensi** selalu diartikan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang dan/atau jasa. Efisiensi yang ekonomis menurut Abdurachman: "Tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang maksimal. *Efficiency* suatu perusahaan diukur oleh keuntungan dan biaya-biaya kedua-duanya, sebab produsen yang paling efektif ialah dia yang keuntungannya mencapai tingkat yang maksimal dan biaya-biayanya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat dari pada factor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya" (Abdurachman, dalam Fajar Sugianto. 2003. hlm 36). Vilfredo Pareto mengemukakan konsep *allocative efficiency* yang hingga sekarang dikenal dengan *pareto efficiency* pada dasarnya menitikberatkan pada pencapaian kepuasan seseorang. Menurutnya suatu peristiwa dapat menghasilkan nilai efisiensi (*allocatively efficient*) apabila dapat membuat para pihak didalamnya menjadi lebih baik, atau paling tidak, tidak ada satu pihak

yang menjadi sengsara. (Klaus Mathis. 2008. hlm 32) Konsep *Efficiency* terhadap keuangan negara yang dipisahkan adalah pengecualian terhadap keuangan negara sebagaimana pengertian keuangan negara Pasal 2 huruf g dan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pendekatan Efisiensi juga berpandangan telah tepat apabila Persero atau Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 11 Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Pendekatan efisiensi juga dapat digunakan untuk tolak ukur dalam penyelesaian kerugian keuangan negara yang berujung kepada tindak pidana korupsi, yang mana pendekatan efisiensi membuka peluang agar kerugian keuangan negara tidak selalu tindak pidana korupsi, bisa saja kerugian keuangan negara yang dimaksud diselesaikan melalui pertimbangan ekonomi atau bisa melalui pendekatan bisnis dengan cara sanksi administratif, denda, penyitaan terhadap harta kekayaan, ganti kerugian ataupun pembayaran sejumlah uang, hal ini senada dengan penilaian efisiensi yang menghindari adanya hal yang bisa merugikan dan mengedepankan sesuatu yang menguntungkan untuk mendatangkan kebaikan.

- e) **Pendekatan Utility** beriringan dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan hukum harus memberikan manfaat dan Ricard Posner menyatakan hukum harus memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan. Utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya (Robert Cooter and Thomas Ulen. 2008, hlm 9), penulis berpendapat pertimbangan ekonomi terhadap hukum, menitikberatkan pertimbangan keuntungan apa yang didapat apabila suatu aturan hukum diberlakukan, berlakunya ketentuan hukum haruslah memberikan manfaat ekonomi apabila dilaksanakan, sudut pandang ekonomi dapat memilah aturan hukum mana yang dapat menghasilkan

keuntungan dan ditaati, aturan hukum haruslah memberikan keleluasaan terhadap pelaku ekonomi dan bukan untuk menghambat.

Kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan Perseroan terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum adalah murni terlepas dari keuangan negara sebagaimana dimaksud didalam undang-undang keuangan negara, keuangan negara berdasarkan pertimbangan ekonomi yang sudah dipisahkan dan disertakan modalnya didalam BUMN dan Perseroan terbatas bukan lagi keuangan negara sehingga didalam pengelolaan keuangan BUMN dan perseroan terbatas tunduk kepada peraturan BUMN dan Perseroan Terbatas, hal ini didasarkan kepada tujuan dibentuknya BUMN dan Perseroan Terbatas adalah untuk mendapatkan keuntungan. Apabila perseroan terbatas mengalami keuntungan maka pemerintah yang menyertakan modalnya didalam perseroan terbatas juga akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi apabila terjadi kerugian didalam menjalankan usahanya BUMN dan Perseroan Terbatas tidak serta merta kerugian yang dialami BUMN dan Perseroan terbatas karena usahanya tidak mendapatkan hasil maka akan dikatakan sebagai kerugian negara, karena kerugian akibat usaha merupakan kerugian usaha (resiko usaha). Jadi penulis berpendapat keuangan BUMN dan Perseroan Terbatas kedudukannya mandiri dan tidak termasuk sebagai keuangan negara sebagaimana dimaksud didalam undang-undang keuangan negara, keuangan negara yang dipisahkan (sudah tidak murni keuangan negara karena menjadi satu kesatuan modal pada BUMN dan Perseroan Terbatas) sudah terlepas dari keuangan negara dalam arti sebenarnya. Pendekatan manfaat juga dapat digunakan untuk menilai resiko dari pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas karena pendekatan ekonomi secara tegas menolak aturan hukum yang dianggap merugikan dan tidak menghasilkan keuntungan (dalam hal ini kerugian keuangan negara yang berujung kepada tindak pidana korupsi), sebaliknya pendekatan ekonomi terhadap hukum menerima aturan yang sifatnya minim resiko dan memberikan kesejahteraan.

B. Akibat hukum terhadap kerugian keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum.

Menurut sudut pandang ekonomi terhadap hukum, keuangan negara yang statusnya telah dipisahkan dari APBN ataupun APBD yang terdapat didalam BUMN dan Perseroan terbatas bukan lagi keuangan negara secara murni, karena telah terjadi pemisahan melalui penyertaan modal yang diletakan pada BUMN dan Perseroan Terbatas baik sebagian ataupun seluruhnya.

Sudut pandang ekonomi menitikberatkan aturan hukum harus memberikan manfaat, keuntungan dan kesejahteraan kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dapat dilihat dari maksud dan tujuan didirikannya BUMN dan Perseroan sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, b. mengejar keuntungan, c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi, e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sedangkan maksud dan tujuan pendirian Persero menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah: a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.”

Sudut pandang ekonomi terhadap hukum memiliki perbedaan dengan sudut pandang mazhab positivisme yang mengartikan hukum merupakan perintah penguasa yang harus dilaksanakan dan apabila tidak melaksanakan hukum tersebut maka akan diberikan sanksi, penulis berpendapat apabila keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan keuangan negara dan apabila terjadi kerugian maka akan merugikan keuangan negara, dan dikenakan sanksi pidana (tindak pidana korupsi) dalam hal ini merupakan ciri dari mazhab positivisme hukum, yang hanya memandang aturan hukum secara normative saja tanpa mempertimbangkan

hal lain seperti sisi sosial, politik maupun sudut pandang ekonomi sedangkan pertimbangan ekonomi dalam melahirkan suatu aturan hukum adalah hukum harus bisa menciptakan kebahagiaan, kemanfaatan, keuntungan dan kesejahteraan sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi oleh aturan hukum maka hukum tersebut bukan merupakan hukum yang baik dan tidak perlu ditaati.

Akibat hukum dari pemisahan keuangan negara dari APBN atau APBD atau sumber lain yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN dan Perseroan Terbatas dari sudut pandang ekonomin terhadap hukum melalui pendekatan rasionalitas, nilai, efisiensi, dan manfaat adalah:

- 1) Hilangnya wewenang negara untuk menuntut secara pidana apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan BUMN dan Perseroan Terbatas melalui aturan hukum tindak pidana korupsi, dalam hal ini pertimbangan ekonomi tidak menghilangkan semua wewenang negara untuk menuntut haknya, karena bagaimanapun juga negara merupakan pemilik modal baik sebagian ataupun seluruhnya yang ada pada BUMN dan Perseroan Terbatas, hanya saja sudut pandang pendekatan pilihan rasional menghilangkan aturan hak menuntut secara hukum pidana dan diganti dengan sanksi administrative, denda, penyitaan harta kekayaan, penggantian kerugian ataupun pembayaran sejumlah uang.
- 2) Perubahan sanksi melalui pendekatan nilai dan efisiensi memilih sanksi yang ideal dalam pengelolaan BUMN dan Perseroan Terbatas adalah, sanksi administrative, denda, penyitaan harta kekayaan, penggantian kerugian ataupun pembayaran sejumlah uang karena lebih mendapatkan manfaat dan keuntungan apabila dilaksanakan serta mengedepankan sesuatu yang menguntungkan untuk mendatangkan kebaikan.
- 3) Pendekatan utility lebih minitikberatkan kepada perlindungan hukum kepada Direksi BUMN dan Perseroan terbatas untuk menghindari adanya krimilanisasi terhadap akibat kerugian keuangan negara, hal ini didasarkan kepada manfaat yang didapat apabila Direksi BUMN dan

Perseroan Terbatas dilindungi didalam pengelolaan dan pengambilan keputusan agar menjalankan BUMN dan Perseroan Terbatas secara maksimal dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, secara otomatis apabila BUMN dan Perseroan Terbatas memperoleh keuntungan maka keuntungan itupun menjadi keuntungan negara.

III. KESIMPULAN

Keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan Perseroan Terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum yang terdiri dari pendekatan rasionalitas, pendekatan nilai, pendekatan efisiensi dan pendekatan utility merupakan keuangan BUMN dan Perseroan Terbatas yang bersifat mandiri dan terpisahkan dari APBN atau APBD atau sumber lain. Kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan Perseroan terbatas berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum adalah murni terlepas dari keuangan negara sebagaimana dimaksud didalam undang-undang keuangan negara, keuangan negara berdasarkan pertimbangan ekonomi yang sudah dipisahkan dan disertakan modalnya didalam BUMN dan Perseroan terbatas bukan lagi keuangan negara sehingga didalam pengelolaan keuangan BUMN dan perseroan terbatas tunduk kepada peraturan BUMN dan Perseroan Terbatas, dan Akibat hukum dari pemisahan keuangan negara dari APBN atau APBD atau sumber lain: hilangnya wewenang negara untuk menuntut secara pidana apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan BUMN dan Perseroan Terbatas melalui aturan hukum tindak pidana korupsi, Perubahan sanksi melalui pendekatan nilai dan efisiensi memilih sanksi yang ideal dalam pengelolaan BUMN dan Perseroan Terbatas adalah, sanksi administrative, denda, penyitaan harta kekayaan, penggantian kerugian ataupun pembayaran sejumlah uang, dan Pendekatan utility lebih minitikberatkan kepada perlindungan hukum kepada Direksi BUMN dan Perseroan terbatas untuk menghindari adanya kriminalisasi terhadap akibat kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. 2006. *Filsafat Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Agus Santoso M. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Samarinda: Kencana Prenada Media Group.
- Cooter Robert B, Ulen Thomas "Law and Economics", sixth Edition Pearson Addison-Wesley. 2012
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erwin Muhamad. 2012. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- L. Tanya. Bernard dkk. 2006. *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV Kita.
- Mahmud Marzuki Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Mathis Klaus. 2008. *Efficiency instead Of justice, Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law*. Springer: Law and Philosophy Library.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi Lili Rasjidi dan ira Thania rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
2007. *Pengantar Filsafat hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sihombing Jhonker. 2010. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugianto Fajar. 2013. *Economic Analysis of Law seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulistiyono Adi. Rustamaji Muhammad. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo. Masmedia Buana Pustaka.
- Soekanto Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universita Indonesia (UI-Press).
- Soesilo M. 2009. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah-Istilah & Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam,*

Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, & Hukum Lingkungan.

Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Tanggal 18 September 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Tanggal 18 September 2014